

## PENGUATAN HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DI INDO-PASIFIK

7

Rizki Roza

### Abstrak

*Menhan dan Menlu Indonesia dan Australia kembali bertemu pada 9 September 2021 dalam rangka 2+2 Dialogue, membahas berbagai hal dan mencapai sejumlah kemajuan. Tulisan ini membahas arti penting peningkatan kerja sama Indonesia-Australia, baik bagi kedua negara maupun kawasan. Penguatan kerja sama tidak menjamin berhentinya pasang surut hubungan kedua negara, tetapi menegaskan bahwa kedua negara saling membutuhkan, terlebih dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis dewasa ini. Keberhasilan dan manfaat penguatan hubungan bilateral tidak dapat diukur terbatas pada nilai perdagangan yang meningkat, jumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan, atau kerja sama pendidikan dan pelatihan militer yang dijalankan. Arti penting penguatan hubungan ada pada kemampuan kedua negara menyelaraskan pandangan dalam mengelola persoalan di kawasan Indo-Pasifik hingga terwujudnya multilateralisme di kawasan Indo-Pasifik, tanpa didominasi satu kekuatan besar manapun.*

### Pendahuluan

Pada 9 September 2021, Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia mengadakan pertemuan dengan Menlu dan Menhan Australia. Pertemuan diawali Menlu Indonesia Retno Marsudi yang bertemu dan berdialog dengan Menlu Australia Marise Payne, sementara Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan Australia Peter Dutton (kemlu.go.id, 10 September 2021). Pertemuan yang dikenal sebagai 2+2 Dialogue ini merupakan pertemuan ke-7 sejak 2012, untuk membicarakan berbagai potensi

kerja sama dan tantangan yang harus dihadapi bersama. Pertemuan membahas berbagai hal, mulai dari upaya menjamin akses vaksin Covid-19 yang setara dan adil, upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, hingga kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan. Dinamika di kawasan Indo-Pasifik, termasuk situasi di Myanmar dan Afghanistan, juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan ini.

Berlandaskan semangat persahabatan, kemitraan, dan prinsip-prinsip *Lombok Treaty* 2006, pertemuan keempat menteri ini menghasilkan *Joint Statement*



yang memuat komitmen-komitmen yang disepakati. Pertemuan ini membawa sejumlah kemajuan penting bagi hubungan kedua negara. Kesepakatan di antaranya memperkuat kerja sama pertahanan dalam penanggulangan terorisme dan ekstrimisme, memperkuat kerja sama di bidang keamanan siber, menandatangani pembaruan *Defence Cooperation Arrangement* (DCA), dan bahkan sepakat membuka kesempatan taruna Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di akademi militer Australia. Kerja sama pelatihan taruna Indonesia di Australia ini akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah hubungan kerja sama antara kedua negara.

Menyikapi berbagai komitmen yang dihasilkan dari pertemuan ini, serta memperhatikan perkembangan hubungan yang cukup signifikan Indonesia-Australia beberapa tahun terakhir, maka parlemen perlu mencermati dengan hati-hati. Catatan sejarah menunjukkan, hubungan diplomatik dua negara tidak selalu menyenangkan. DPR RI perlu memastikan, perkembangan ini dapat menghasilkan hubungan bilateral yang setara, saling menguntungkan, dan lebih stabil, serta berkontribusi bagi kemajuan kawasan. Tulisan ini membahas arti penting penguatan hubungan bilateral Indonesia-Australia baik bagi kedua negara maupun kawasan.

### **Dinamika Hubungan Bilateral**

Indonesia-Australia adalah dua negara bertetangga yang berbagi batas maritim terpanjang di dunia. Hubungan diplomatik kedua negara telah berlangsung lebih dari 70 tahun, dimulai cukup baik dengan berbagai dukungan Australia di awal kemerdekaan Indonesia. Namun

kedekatan geografis dan peran Australia di masa awal kemerdekaan Indonesia tidak cukup menghasilkan hubungan bilateral yang stabil. Dalam perjalanan selama beberapa dekade, hubungan kedua negara berlangsung sangat baik, namun di waktu lainnya merosot tajam. Berbagai hal, termasuk perbedaan budaya dianggap sebagai faktor penyebabnya. Pemberitaan media yang berlebihan dan kurangnya kepekaan para pembuat kebijakan di Australia terhadap isu-isu sensitif di Indonesia juga menjadi faktor penyebab.

Meskipun hubungan bilateral Indonesia-Australia memiliki catatan sejarah pasang surut, banyak pengamat meyakini, kedua negara memiliki cukup banyak kesamaan pandangan dan pemikiran. Dihadapkan pada perkembangan regional dan global, kedua negara pun terus berusaha menyesuaikan diri dan mempererat hubungan. *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (2005) dan *Lombok Treaty* (2006) semestinya menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kerja sama dan mengesampingkan isu-isu yang dapat merusak hubungan. Kenyataannya, dalam beberapa kesempatan hubungan kedua negara kembali mengalami gangguan.

2+2 *Dialogue* merupakan salah satu mekanisme, selain *Annual Leaders' Meeting* (ALM) dan *Indonesia-Australia Dialogue* (IAD), yang dikembangkan sejak tahun 2011 sebagai mekanisme hubungan utama antara kedua negara. Pertama kali dilaksanakan di Canberra pada 2012, 2+2 *Dialogue* merupakan forum Menlu dan Menhan kedua negara untuk bersama-sama membahas isu-isu strategis di tingkat bilateral, regional, maupun global. Forum ini juga dimanfaatkan untuk memajukan kerja sama untuk stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan.

Upaya kedua negara mempererat hubungan semakin kuat beberapa tahun terakhir. Interaksi yang melibatkan elit pemerintah, kelompok bisnis, maupun masyarakat umum terus meningkat. Setiap kali Perdana Menteri Australia diangkat, Indonesia menjadi negara tujuan pertama kunjungan kenegaraannya. Ini berbeda dengan tradisi lama yang memilih London atau Washington sebagai tujuan lawatan perdana. Kunjungan Jokowi (2017) dan kunjungan PM Scott Morrison pada Agustus 2018 yang diikuti selesainya perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IACEPA)* bisa dilihat sebagai fase penting menguatnya hubungan kedua negara. Kedua pemimpin bahkan sepakat meningkatkan hubungan bilateral menjadi *Comprehensive Strategic Partnership*. Selanjutnya pidato Presiden Jokowi di hadapan parlemen Australia (Februari 2020) kembali mencerminkan hubungan yang menguat antara kedua negara.

Indonesia dan Australia berada di kawasan yang saat ini berkembang sangat dinamis yang menuntut peninjauan ulang kebijakan-kebijakan luar negerinya. Bagaimana dinamika di kawasan ini akan memengaruhi hubungan *Indonesia-Australia*? Persoalan kawasan bisa saja menjadi faktor yang akan kembali merusak hubungan, atau sebaliknya justru menjadi faktor pendorong kedua negara untuk mempererat kerja sama.

### **Kekuatan Kawasan yang Saling Membutuhkan**

Hubungan bilateral *Indonesia-Australia* yang berulang kali pasang surut, juga mencatat pertumbuhan yang cukup baik di berbagai bidang antara lain: kerja sama perdagangan cukup baik meski bukan mitra dagang utama; Australia merupakan sumber

wisatawan penting bagi Indonesia; kerja sama penanganan terorisme kedua negara dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia; dan kerja sama pendidikan dan kebudayaan yang terus berkembang. Bahkan saat ini, hubungan dagang berpotensi maju akibat implementasi *IA-CEPA* dan adanya gangguan hubungan antara Australia dan China.

China sebenarnya mitra dagang terbesar Australia, tetapi hubungan yang memburuk dan pandemi yang berdampak pada perekonomian mendesak Australia memperluas pasar dan melakukan diversifikasi sektor ekonomi, serta mengkaji kembali hubungan dagang dengan China. Kondisi ini direspons pemerintahan PM Scott Morrison dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama ([republika.co.id](http://republika.co.id), 10 Februari 2020). Pada dasarnya Indonesia dan Australia saling membutuhkan, terlebih dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik dewasa ini.

Hubungan bilateral *Indonesia-Australia* tidak dapat dibangun hanya dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kepentingan nasional yang pragmatis, tetapi juga harus merespons kepentingan strategis yang lebih luas. Kedua negara berada di lingkungan strategis yang saat ini menjadi wahana perebutan pengaruh antara dua kekuatan raksasa dunia, Amerika Serikat dan China. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan didukung modernisasi kekuatan militer yang handal, China tampil sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan. Dengan kekuatannya, China berhasil memperluas kerja sama dan pengaruh ke berbagai negara, dari kawasan Pasifik hingga Hindia. Namun, sikap China yang semakin koersif

dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkaitan dengan klaim wilayah di Laut China Selatan (LCS), menimbulkan kekhawatiran banyak negara akan terbatasnya akses dan pengaruh yang selama ini telah mereka nikmati akibat dominasi China.

AS masih merupakan satu-satunya negara yang memiliki kemampuan dan menyatakan komitmen untuk menjamin keamanan dan kemakmuran sekutu-sekutunya di kawasan. AS berulang kali menegaskan komitmen untuk menjaga kebebasan navigasi di LCS yang mungkin menjadi terbatas jika dikuasai oleh China. Namun demikian, kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump telah memengaruhi kebijakan luar negeri banyak negara di kawasan, termasuk sekutu-sekutunya tak terkecuali Australia. Beberapa tahun terakhir muncul sikap yang mempertanyakan kapasitas AS untuk memelihara keseimbangan kekuatan di kawasan yang dipandang telah menurun akibat pertumbuhan pesat militer China.

Perebutan pengaruh dua kekuatan besar ini menjadi dinamika yang tidak terhindarkan bagi Australia, terlebih sebagai sekutu penting AS di kawasan. Meluasnya pengaruh China dan keraguan atas kapasitas AS mengimbangi China secara tidak langsung juga menyebabkan merosotnya pengaruh strategis Australia di kawasan. Selain itu, kehadiran kekuatan-kekuatan lain dari kawasan Samudera Hindia, terutama India, juga turut melemahkan posisi Australia. Hal ini mendesak Australia untuk berperan lebih aktif di kawasan Indo-Pasifik untuk memperoleh kembali pengaruhnya.

Banyak pihak di Australia mendorong pemerintahnya mengkaji ulang kebijakan-kebijakan luar

negeri, terutama terkait AS. Kebijakan pertahanan pun turut mempertimbangkan mengurangi ketergantungan terhadap AS. Upaya Australia menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan dinamika kawasan terlihat dalam dokumen *Foreign Policy White Paper Australia* (2017). Dokumen tersebut menyebutkan, mereka menginginkan terwujudnya keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya. Selanjutnya dokumen *Defense Strategic Update and Force Structure Plan* yang dirilis pada 2020 kembali menegaskan keinginan Australia untuk menjalankan peran lebih aktif dalam mempertahankan tatanan regional di Indo-Pasifik.

Terkait dinamika kawasan, Indonesia telah menunjukkan sikap konsisten untuk tidak memihak pada salah satu kekuatan. Indonesia berupaya mencapai keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar itu. Konsistensi menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penting bagi dua kekuatan itu, dan juga bagi sesama kekuatan menengah lainnya di kawasan. Indonesia juga berupaya membawa ASEAN pada posisi ini. Dalam berbagai kesempatan, untuk merespon berbagai isu yang berkaitan dengan persaingan antara dua kekuatan raksasa ini, Indonesia selalu menyerukan ASEAN untuk bersikap netral. *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* yang menegaskan posisi ASEAN untuk tidak memihak merupakan capaian penting Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya dalam menjaga sentralitas ASEAN dan mengelola tatanan kawasan.

Indonesia bersama ASEAN membutuhkan dukungan kekuatan menengah kawasan, termasuk Australia, untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang dicita-citakan

ASEAN. Meskipun Australia merupakan bagian dari The Quads, bagi Indonesia, Australia adalah mitra yang bisa menerima gagasan sentralitas ASEAN dalam menjaga dan mendorong stabilitas, perdamaian, kemakmuran, dan inklusifitas di kawasan Indo-Pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir, tatanan kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu agenda penting dalam setiap pertemuan antara pemimpin dan pejabat kedua negara. Indonesia berkepentingan menjaga hubungan dengan Australia agar upaya mencapai konvergensi terkait konsep Indo-Pasifik dapat terus berlangsung, terlebih pasca perjanjian pertahanan antara Australia, Inggris, dan AS pada 15 September 2021.

Posisi Indonesia sebagai kekuatan penting dengan tegas diakui oleh Australia. Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 menempatkan Indonesia sejajar dengan India dan Jepang (dfat.gov.au). Australia menganggap ketiga negara ini penting karena dinilai memiliki kemampuan memengaruhi tatanan kawasan. Australia tidak dapat mengabaikan posisi Indonesia jika ingin tampil sebagai salah satu kekuatan berpengaruh di kawasan. Hal ini menempatkan Indonesia-Australia pada posisi saling membutuhkan untuk kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Keinginan terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, berlandaskan aturan internasional dan inklusif menjadi pondasi penting kesamaan pandangan kedua negara dalam merespon berbagai persoalan. Penguatan kerja sama dan kemitraan bilateral Indonesia-Australia memiliki arti penting bagi kerja sama yang lebih luas antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

## Penutup

Penguatan kerja sama Indonesia-Australia tidak menjadi jaminan bahwa pasang surut hubungan kedua negara tidak akan terjadi lagi. Tetapi kedua negara ini saling membutuhkan, terlebih dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Keberhasilan dan manfaat penguatan hubungan bilateral juga tidak dapat diukur terbatas pada nilai perdagangan yang meningkat, jumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan, atau kerja sama pendidikan dan pelatihan militer yang dijalankan. Sejauh mana kedua negara dapat menyelaraskan pandangan dalam mengelola persoalan di kawasan Indo-Pasifik akan lebih menggambarkan keberhasilan penguatan hubungan mereka. Indonesia dengan mengedepankan sentralitas ASEAN, bersama Australia dan negara kekuatan menengah lain berpeluang mewujudkan multilateralisme di kawasan Indo-Pasifik, tanpa didominasi satu kekuatan besar manapun. Ini akan menjadi nilai terpenting dari penguatan hubungan Indonesia dan Australia.

## Referensi

- “Australia Mulai Jadikan Indonesia Mitra Dagang Utama”, 10 Februari 2020, <https://www.republika.co.id/berita/q5gjm370/australia-mulai-jadikan-indonesia-mitra-dagang-utama>, diakses 12 September 2021.
- “Australia Steps Up in Defense of the Indo-Pacific Order”, 1 September 2020, <https://thediplomat.com/2020/08/australia-steps-up-in-defense-of-the-indo-pacific-order/>, diakses 12 September 2021.

Devine, Louis. 2020. "Australia Should Re-Imagine Its Alliance With the United States", 7 Mei 2020, <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/australia-should-re-imagine-its-alliance-with-the-united-states/> diakses 12 September 2021.

Keller, Greta Nabbs. "Australia-Indonesia: An Uncertain World Makes for Firm Friends", <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-indonesia-uncertain-world-makes-firm-friends>, diakses 12 September 2021.

Parameswaran, Prashanth. 2020. "The Growing Indo-Pacific Dimension in Indonesia-Australia Relations", 12 Februari 2020, <https://thediplomat.com/2020/02/indonesia-australia-relations-whats-in-the-growing-indo-pacific-dimension/>, diakses 12 September 2021.

"RI-Australia Perkuat Kolaborasi dalam Pertemuan 2+2", 10 September 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2910/berita/ri-australia-perkuat-kolaborasi-dalam-pertemuan-22>, diakses 12 September 2021.



Rizki Roza  
[rizki.roza@dpr.go.id](mailto:rizki.roza@dpr.go.id)

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran" (2010); "Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer" (2013); dan "Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan" (2013).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.